



BELA NEGARA

**Kesadaran Kolektif Bangsa
dan
Tantangan Masa Depan**

**Kolonel Kav Tjetjep Darmawan.
Kolonel Inf Faisal Ahmadani, S.E., M.Si.
Kolonel Mar Yudi Junaedi, S.E.
Kolonel Sus Andi Muh. Darlis, S.I.P., M.I.P., M.Si.
Kapten Inf Dr. Teguh Anggoro, S.I.P., M.Sc.**

BELA NEGARA

Kesadaran Kolektif Bangsa dan Tantangan Masa Depan

Kolonel Kav Tjetjep Darmawan.

Kolonel Inf Faisal Ahmadani, S.E., M.Si.

Kolonel Mar Yudi Junaedi, S.E.

Kolonel Sus Andi Muh. Darlis, S.IP., M.IP., M.Si.

Kapten Inf Dr. Teguh Anggoro, S.I.P., M.Sc.



BELA NEGARA

Kesadaran Kolektif Bangsa dan Tantangan Masa Depan

Penulis:

Kolonel Kav Tjetjep Darmawan.
Kolonel Inf Faisal Ahmadani, S.E., M.Si.
Kolonel Mar Yudi Junaedi, S.E.
Kolonel Sus Andi Muh. Darlis, S.IP., M.IP., M.Si.
Kapten Inf Dr. Teguh Anggoro, S.I.P., M.Sc.

Editor:

Erik Santoso

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Desember 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Rafflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 18 x 25 cm
ISBN : -

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan letak yang strategis jelas sangat menguntungkan. Namun, yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan manusia Indonesia untuk berkompetisi dengan bangsa lain di dunia, terutama kesiapan mental. Kesiapan mental ditandai dengan terbangunnya karakter yang dibutuhkan guna menghadapi Indonesia Emas 2045 adalah kemampuan untuk menghadapi derasnya kemajuan teknologi, terutama teknologi robotik, yang tidak bisa menggantikan manusia karena ketidakadaan *critical thinking* (kemampuan untuk mengkritik) atau merasakan emosional. Kesiapan mental dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang menempatkan penggunaan robot sebagai tenaga kerja menjadi tantangan bagi seluruh manusia Indonesia terutama generasi muda yang diproyeksikan akan memimpin negeri ini pada peringatan di 100 tahun Kemerdekaan Indonesia. Apabila tidak ada turbulensi politik yang mengganggu stabilitas nasional, berbagai pihak seperti Bank Dunia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI) memprediksikan bahwa Indonesia berpeluang untuk masuk 10 besar negara perekonomian terkuat di dunia pada 2030, dengan catatan kondisi Indonesia di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terus membaik, Indonesia akan bersaing dengan negara-negara yang saat ini menguasai perekonomian dunia, seperti Amerika Serikat dan China. Bonus demografi yang diperkirakan akan didapatkan Indonesia dalam kurun waktu tersebut merupakan kunci meningkatnya produktivitas dan sekaligus kemandirian perekonomian Indonesia. Persaingan untuk mendapatkan dan menguasai sumber daya alam yang

justru semakin menipis, semain ketat bahkan menghalalkan segala cara. Persaingan tersebut telah menimbulkan konflik yang berujung terjadinya peperangan di berbagai belahan dunia seperti: Mesir, Libya, Irak, Iran, Kuwait, Suriah, Sudan, Kongo, Yaman, Nigeria, dan Ukraina. Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dunia seiring meningkatnya angka harapan hidup, meningkatkan *demand* sementara suplai kebutuhan justru semakin mengecil. Persaingan untuk mendapatkan dan menguasai sumber daya alam terutama mineral dan bahan bakar fosil terus membawa dunia pada situasi yang seakan terlihat seperti neo-kolonialisme dan sekaligus neo- imperialisme.

Bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh Warga Negara RI, secara konstitusional dasar hukum bela negara diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 6, pasal 7 dan pasal 9. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, pada tanggal 18 Desember 2006 Presiden Republik Indonesia Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela Negara.

Buku ini dibuat untuk kalangan terpelajar (Dosen, mahasiswa, praktisi, dan masyarakat). Buku ini didekasikan sebagai media untuk kembali

menggelorakan semangat Bela Negara. Tantangan di masa depan akan semakin kompleks, ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa akan terus dihadapi. Bela Negara seharusnya dapat menjadi salah satu jawaban untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dengan demikian, Bela Negara sudah seharusnya menjadi kesadaran kolektif. Kesadaran bersama bahwa kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa merupakan tanggung-jawab bersama semua komponen bangsa dan setiap warga negara.

Rumpin, 19 Desember 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	IV
BAB I 19 DESEMBER 1948: IBU PERTIWI MEMANGGIL!	1
A. Kita telah diserang !	2
B. Rapat Kabinet	9
C. Presiden dan Wakil Presiden ditawan Belanda	11
D. Pemerintahan Darurat di Bukit Tinggi	12
E. Bela Negara : Panggilan Ibu Pertiwi	14
BAB II SEJARAH SINGKAT KEBELANEGARAAN DI INDONESIA	16
A. Pendidikan Pendahuluan tentang Pertahanan Rakyat	19
B. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)	20
C. Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah	23
D. Penetapan Hari Bela Negara	25
E. Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	25
F. Agenda Sikap Perilaku Bela Negara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	26
G. Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019	28
BAB III ANCAMAN <i>VIS A VIS</i> BELA NEGARA	31
A. Paradigma Ancaman	31
B. Bela Negara: Teori dan Konsep	37
C. <i>Vis a Vis</i>	45
BAB IV KEMAMPUAN KEWASPADAAN DINI	47
A. Pengertian Kewaspadaan Dini	47
B. Kemampuan Kewaspadaan Dini	48
C. Relasi Kemampuan Kewaspadaan Dini dengan Kemampuan Bela Negara	51
BAB V MENGGUGAT RADIKALISME MELALUI BELA NEGARA	53
A. Radikalisme sebagai ideologi	62
B. Konsep Radikalisme sebagai Ideologi kekerasan	65
C. Genealogi Radikalisme Agama di Indonesia.	67
D. Penguatan Bela Negara	69
BAB VI BELA NEGARA DI RUANG SIBER	74

A. Propaganda Siber (<i>cyber propaganda</i>)	75
B. Propaganda komputasional	82
C. Aktualisasi Nilai Dasar Bela Negara di Ruang Siber	83
BAB VII BELA NEGARA SEBAGAI PENOPANG KETAHANAN NASIONAL (BELAJAR DARI BERBAGAI KONFLIK DI INDONESIA)	86
A. Bela Negara sebagai Upaya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	94
B. Bela Negara sebagai upaya Penguatan Ketahanan Nasional.	101
C. Kesimpulan	104
BAB VIII NASIONALISME, PATRIOTISME DAN SEMANGAT BELA NEGARA : MODAL DASAR BANGSA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA DEPAN	106
A. Negara dan Warga Negara	107
B. Nasionalisme sebagai kesadaran kolektif bangsa	109
C. Patriotisme dan Semangat Bela Negara	111
D. Tantangan Masa Depan: Menjadi Bangsa Besar dan Disegani di Dunia	115
BAB IX BELA NEGARA TANPA BATAS	118
A. Prolog	119
B. Spiritualitas Bela Negara	121
C. Internalisasi Nilai Kepahlawanan	129
D. Tantangan masa kini	133
E. Epilog	137
BAB X SIAPA MENJADI PANUTAN?	140
A. Kesadaran Masyarakat Akan Bela Negara	148
B. Nasionalisme	151
C. TNI Sebagai Contoh	153
D. Kesimpulan	157
BAB XI IMPLEMENTASI PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN) PADA SISTEM PERTAHANAN SEMESTA	159
A. Latar Belakang	159
B. Tinjauan Teori	161
C. Konsep Implementasi Kebijakan.	164
D. Model Implementasi Kebijakan.	165
E. Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	167
F. Analisa dan Upaya Yang Dilaksanakan.	169

PENUTUP	176
SARAN	179
DAFTAR PUSTAKA	181
BIOGRAFI PENULIS	193

BAB I

19 DESEMBER 1948:

IBU PERTIWI MEMANGGIL!

Tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, ini didasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat yang muncul adalah semangat bela negara, semangat kebangsaan guna mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tanggal 19 Desember 1948 sesungguhnya merupakan tanggal di mana konsep sistem pertahanan semesta mulai digunakan dan kemudian terbukti efektif menghadapi Agresi Militer II Belanda. Kesadaran dan semangat bela negara tidak saja ditunjukkan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, tetapi juga komponen bangsa lainnya. Terbukti bahwa dorongan semangat kebangsaan dalam bela negara mampu mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Perlawanan semesta dimulai di seluruh penjuru Indonesia, diawali dengan sandi : “Ibu Pertiwi Memanggil !, Ibu Pertiwi Memanggil !, Ibu Pertiwi Memanggil !”, segenap komponen bangsa bersatu, bahu membahu untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, sebuah pembuktian

sejarah bahwa sesungguhnya Bela Negara adalah panggilan Ibu Pertiwi bagi segenap komponen bangsa.

A. Kita telah diserang !

Tanggal 19 Desember 1945, pukul 06.00 Kota Yogyakarta yang saat itu menjadi Ibukota Republik Indonesia mulai dibombardir dari udara oleh armada tempur Kerajaan Belanda. Lapangan udara diserang dari udara oleh Angkatan Udara Kerajaan Belanda yang terdiri atas 5 pesawat tempur F51 *Mustang* dan 9 pesawat tempur P40 *Kittyhawk*. Setelah serangan udara langsung tersebut, sekira pukul 06.25, pasukan para dari Grup Tempur Para 1 (*Ge-Vechtsgroep Para 1*) Kerajaan Belanda diterjunkan dengan sasaran perebutan udara Lapangan Udara Meguwo. Penerjunan selesai pada pukul 07.04, Grup Tempur Para 1 bergerak guna menduduki tumpuan udara, menghapu perlawanan yang tidak berimbang dari prajurit-prajurit Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Kadet Udara Kasmiran, Sersan Mayor Udara Tanumiharjo, Kopral Udara Tohir dan 30 orang prajurit lainnya harus gugur sebagai kesuma bangsa dalam upaya mempertahankan Lapangan Udara Meguwo¹. Belanda juga mendaratkan Brigade Marinir yang kemudian bergerak menuju Kota Yogyakarta sehingga pada hari itu juga Kota Yogyakarta dapat dikuasai oleh Belanda². Namun berbeda halnya dengan Agresi Militer I Belanda, di mana “aksi polisional” kedua-nya Belanda

¹ Himawan Sutanto, *Yogyakarta: Jenderal Spoor (Operatie Kraai versus Jenderal Sudirman (Perintah Siasat No.1))*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 282-283.

² Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat, Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat*, Bandung-Jakarta, Mahjuma, 1972. hal. 162.

harus menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.

Panglima Besar Jenderal Soedirman telah mendapatkan laporan bahwa Belanda menyerang Kota Yogyakarta pada pukul 05.00. Beliau yang sudah kurang lebih selama 3 bulan harus beristirahat karena sakit mendadak seperti mendapatkan semangat dan kekuatan baru. Beliau mengutus Kapten Soeparjo untuk menghadap Presiden Soekarno, namun dikarenakan Kapten Soeparjo belum juga kembali pada pukul 09.00, Panglima Besar dengan hanya memakai piyama dan mantel hitam didampingi dr. Soewondo menghadap Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memberi nasehat kepada Jenderal Soedirman untuk beristirahat, namun ditolak Panglima Besar. Saat Kabinet bersidang, Panglima Besar menunggu di luar ruang sidang, sementara pesawat-pesawat Belanda masih terus menjatuhkan bom di berbagai sasaran di Kota Yogyakarta. Dr. Soewondo akhirnya meminta Panglima Besar jenderal Soedirman untuk kembali ke rumah di Bintaran. Setelah membakar semua dokumen, pukul 11.30 Panglima Besar meninggalkan rumahnya menuju Kadipaten. Setelah tiba dan menunggu selama kurang lebih 1 jam, pukul 14.00 Panglima Besar meninggalkan Kota Yogyakarta untuk memimpin Perang Gerilya.³ Penolakan Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk beristirahat akibat sakit yang dideritanya jelas bukan bentuk pembangkangan, namun bentuk tanggung-jawab pribadi beliau sebagai seorang Panglima Besar untuk mempertahankan kemerdekaan negerinya. Kehadiran beliau di tengah-tengah pasukan gerilya memberikan dampak yang luar biasa, tidak saja terhadap pasukan TNI tetapi juga rakyat yang secara langsung maupun tidak

³ T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*, PMK HKBP Jakarta, 2019. hal. 274-277.

langsung terlibat dalam perang berlarut, perang gerilya terutama di Pulau Jawa.

Salah satu fakta empiris konsep bela negara adalah keberhasilan perang gerilya. Salah satu kunci keberhasilan dalam perang gerilya adalah dukungan rakyat, baik dukungan logistik maupun dukungan informasi. Dukungan rakyat telah memporak-porandakan gerakan musuh dan mengakibatkan terganggunya kejiwaan dan mental penjajah.⁴ Tanpa dukungan rakyat, sulit kiranya bagi TNI ketika harus berhadapan dengan tentara Belanda yang lebih terlatih, lebih teroganisir dan lebih modern. Dukungan rakyat juga menjadi kekuatan moral bagi TNI, kekuatan dari dalam setiap prajurit untuk mempertahankan kemerdekaan negerinya. Hal sebaliknya terjadi pada tentara Belanda, dukungan rakyat terhadap TNI telah meluluh-lantakaan semangat bertempur mereka. Rasa percaya diri mereka terus terkikis saat menyaksikan bahwa aksi-aksi ofensif mereka tidak menyurutkan dukungan rakyat terhadap TNI dan justru sebaliknya semakin menguatkan kemandirian TNI-rakyat. Kesadaran rakyat untuk terlibat langsung dalam upaya mempertahankan kemerdekaan pada Agresi Militer II Belanda juga membuktikan bahwa kesadaran Bela Negara telah dimiliki oleh segenap Bangsa Indonesia sejak negeri ini diproklamasikan kemerdekaannya. Kedaulatan dipertaruhkan dengan segala hal yang dimilikinya, tidak saja materiil, tetapi juga bahkan nyawa yang dimilikinya. Universalitas konsep Bela Negara memang dapat terlihat di berbagai penjuru dunia, namun semakin mengemuka pada Perang Dunia II dimana banyak negara-negara jajahan memerdekakan

⁴ Letjen TNI (Purn) Syarifudin Tippe, M.Si. *Ilmu Pertahanan : Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*, Jakarta, Salemba Humanika, 2017. hal. 120.

dirinya terutama di kawasan Asia dan Afrika. Penjajahan dan penindasan berkepanjangan telah melahirkan sebuah konsep perlawanan kolektif terhadap ketidakadilan, kesemena-menaan dan penistaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasifikasi ala Belanda yang terus ingin mempertahankan eksistensinya di Indonesia menunjukkan keserakahan dan ketamakaan yang sepatutnya mendapatkan resistansi dari seluruh Bangsa Indonesia. Otoritas ruang yang diharapkan diperoleh Belanda dengan Agresi Militer II-nya kemudian justru harus berhadapan dengan penguasaan ruang yang lebih baik dalam pembentukan kantong-kantong gerilya dan pemerintahan gerilya yang kemudian diemban oleh PDRI di Bukit Tinggi.

Ide dasar tersebut dapat merefleksikan hakikat bela negara serta OMP dan OMSP berada dalam satu subtansi yang dapat didayagunakan sebagai rujukan dalam rangka mengangkat eksistensi sebuah negara. Satu dalam subtansi memiliki makna bahwa konsep berada pada posisi filosofis yang bersifat abstrak dan memiliki prinsip-prinsip dasar yang bisa mengatur fakta, yaitu fakta yang dilaksanakan oleh OMP dan OMSP sebagai cerminan “cinta tanah air”.⁵ Dalam rangka mengangkat eksistensi Republik Indonesia, perang gerilya yang merupakan OMP menunjukan bahwa secara hakikat Bela Negara adalah upaya bersama TNI dan rakyat dalam OMP. Perang gerilya menghadapi Agresi Militer II Belanda menunjukan adanya satu kesatuan antara TNI dan rakyat yang kesemuanya didasarkan oleh kecintaan pada tanah air Indonesia. Pendayagunaan hakikat Bela Negara sebagai satu subtansi dengan OMP berlangsung efektif dan terbukti mampu menghadapi tekanan militer Belanda.

⁵ *Ibid*, hal. 177.

Sebelum berangkat menghadap Presiden Soekarno, Panglima Besar Jenderal Soedirman telah mengeluarkan perintah angkatan perang yang disebut sebagai “Perintah Kilat” yang kemudian disampaikan kepada penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Sersan Mayor Kolopaking untuk disiarkan, yang berbunyi :

1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang Yogyakarta dan Lapangan Terbang Meguwo.
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan gencatan senjata.
4. Semua angkatan perang menjalankan rencana untuk menghadapi serangan Belanda.⁶

TNI sesungguhnya telah mempersiapkan diri menghadapi Agresi Militer II Belanda. Tanggal 9 November 1948 Panglima Besar Jenderal Soedirman telah mengeluarkan instruksi yang dikenal dengan “Perintah Siasat No.1”.⁷ Dalam perintah ini diatur bahwa segera setelah Belanda menyerang, pasukan yang kuat bersama pamongpraja melintasi garis *status quo* menuju daerah-daerah yang ditinggalkan sebelum perjanjian *Renville*. Perang rakyat dilaksanakan di seluruh Jawa dipimpin dari luar kota oleh TNI dan pamongpraja. Pasukan yang sebelumnya dihijrahkan, melakukan gerakan ke daerah pendudukan atau “*Wingate*”, yang diambil dari nama seorang Jenderal Inggris “Wingate” yang memimpin gerakan militer di Burma hingga jauh ke belakang garis pertahanan musuh.⁸ Garis-garis demarkasi telah menjadi pembatas kedaulatan, membagi

⁶ Amrin Imran, Saleh A. Djamhari dan J.R. Chaniago, *PDRI dalam Perang Kemerdekaan, Perhimpunan Kekerabatan Nusantara*, Jakarta, 2003, hal. 47-48.

⁷ Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat, Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat dan Fa. Mahjuma*, Bandung-Jakarta, 1972, hal. 164.

⁸ T.B. Simatupang, *Laporan dari Banaran*, PMK HKBP Jakarta, 2019, hal. 222.

otoritas kewilayahan sesuai dengan kemauan dan kemampuan Belanda atau dengan kata lain sangat menguntungkan Belanda. Bagi TNI, jelas tidak terlalu sulit untuk kembali ke daerah pendudukan yang sejatinya merupakan kampong halaman mereka. Namun, sekali lagi tanpa dukungan rakyat, hal tersebut akan terasa sangat berat.

“Perintah Siasat No. 1” merupakan konsep yang kemudian dikenal sebagai “Konsep Perang Rakyat Semesta”, yang disusun oleh Panglima Divisi Siliwangi Kolonel A.H. Nasution dan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang⁹ yang hingga saat ini masih menjadi konsep pertahanan negara Republik Indonesia. Dalam Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa : “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman”. Pelibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut diuraikan bahwa pengelolaan sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui usaha Bela Negara, penataan

⁹ Daud Sinjai dan Atmadhi Sumarkidjo, *Himawan Soetanto : Menjadi TNI*, Jakarta, Kata Hasta Pustaka, 2009, hal. 131.

Komponen Pendukung, dan pembentukan Komponen Cadangan. Bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap Warga Negara yang diselenggarakan melalui usaha Pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela Negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuhkembangkan melalui usaha Bela Negara.

Agar para komandan pasukan TNI dapat mempersiapkan segera perang gerilya, Perintah Siasat No. 1 tersebut disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta dengan sandi :” Ibu Pertiwi Memanggil, Ibu Pertiwi Memanggil, Ibu Pertiwi Memanggil”.¹⁰ Sandi ini juga digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman saat menghadapi Agresi Militer I Belanda 21 Juli 1947. Melalui siaran radio RRI Yogyakarta, Panglima Besar menyiarkan pesan yang sama sebanyak tiga kali sebagai tanda bahwa Belanda mulai melakukan penyerbuan.¹¹ Panggilan Ibu Pertiwi terus dikumandangkan. Panggilan untuk mempertahankan negeri yang terancam kedaulatannya. Ibu Pertiwi sedang bersusah-hati, dan segenap komponen bangsa terpanggil untuk tidak terus membiarkan Ibu Pertiwi larut dalam kesedihannya. Meskipun sejatinya sandi tersebut ditujukan bagi TNI sebagai tanda dimulainya perang gerilya, panggilan tersebut juga telah menggelorakan semangat segenap komponen bangsa untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Rakyat-pun merasa terpanggil, demikian juga dengan para pamongpraja serta para

¹⁰ Amrin Imran, Saleh A. Djamhari dan J.R. Chaniago, *PDRI dalam Perang Kemerdekaan, Perhimpunan Kekerabatan Nusantara*, Jakarta, 2003, hal. 52.

¹¹ Ibid, Dinas Sejarah Militer hal. 135.

pemimpin sipil lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya masing-masing.

B. Rapat Kabinet

Pagi hari 19 Desember 1948 dilaksanakan rapat kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno di Kepresidenan, tidak semua menteri dapat hadir. Dalam rapat tersebut diputuskan beberapa hal, antara lain :

1. Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal di dalam kota agar dapat selalu berhubungan dengan Komisi Tiga Negara (KTN) sebagai alat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*).
2. Wakil Presiden selaku Menteri Pertahanan dengan perantaraan radio agar menganjurkan kepada tentara dan rakyat untuk melaksanakan perang gerilya terhadap tentara Belanda.
3. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafrudin Prawiranegara di Bukit Tinggi bahwa ia diangkat sementara membentuk Pemerintahan Darurat, membentuk kabinet, dan mengambil alih pemerintahan pusat.¹²

Anjuran Wakil Presiden selaku Menteri Pertahanan kemudian disebut dengan “Order Harian”, yang berbunyi :

“Mungkin pemerintah di Yogya terkepung dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, tetapi persiapan telah diadakan untuk meneruskan Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera. Apa

¹² Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku, Sebuah otobiografi : Menuju Gerbang Kemerdekaan*, Jakarta, Kompas, 2011, hal, 198-199.

yang terjadi dengan orang-orang pemerintah di Yogyakarta, perjuangan diteruskan”¹³.

Order harian ini merupakan bentuk instruksi pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia untuk meneruskan perjuangan meskipun Yogyakarta telah diduduki Belanda. Order ini juga menunjukkan bahwa kepungan Belanda terhadap Yogyakarta tidak dapat menghentikan jalannya pemerintahan sebuah negeri berdaulat, pemerintahan yang berdaulat tetap diselenggarakan di Sumatera.

Sebelum Agresi Militer II Belanda, sesungguhnya pemerintah Republik Indonesia telah mempersiapkan diri didasarkan pada pengalaman menghadapi Agresi Militer I Belanda. Rencana Republik dirumuskan dalam sidang-sidang Dewan Siasat Militer dan beberapa kali dalam sidang-sidang kabinet. Pokok-pokok utama rencana tersebut, sebagai berikut : diplomasi untuk mengerahkan pendapat dunia, bumi hangus, non-kooperasi di kota-kota yang diduduki musuh, dan perang rakyat yang lama. Dalam rencana tersebut, Presiden Soekarno seharusnya berangkat ke India untuk memimpin usaha diplomasi dan Wakil Presiden memimpin perjuangan dari salah satu tempat di Sumatera.¹⁴ Penunjukan Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawiranegara untuk melanjutkan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan Menteri Maramis sedang berada di luar negeri, sementara kemungkinan Presiden ke luar negeri sudah tidak lagi ada disebabkan Belanda langsung menyerang ibukota negara. Kemungkinan presiden tertawan Belanda sangat besar dan kemungkinan akan merusak semangat rakyat.¹⁵

¹³ Ibid Amrin Imran, hal. 53.

¹⁴ Ibid, T.B. Simatupang 2019, hal. 220.

¹⁵ Ibid. hal. 224.

Kekhawatiran ini kemudian dapat disingkirkan. Kehadiran Panglima Besar Jenderal Soedirman di tengah medan perang gerilya telah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya dan masa depan negerinya. Justru kemudian penawanan para pemimpin republik semakin mengobarkan semangat perlawanan rakyat.

C. Presiden dan Wakil Presiden ditawan Belanda

Sore hari, tanggal 19 Desember 1948, sekira pukul 15.00, Wakil Presiden Mohammad Hatta dijemput oleh Mr. A. Gafar Pringgodigdo dikawal oleh dua serdadu KNIL. Presiden dan Wakil Presiden tinggal di Kepresidenan hingga tanggal 22 Desember 1948. Pada pukul 08.00, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama dengan Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Mr. Assaat, Mr. A. Gafar Pringgodigdo, dan Suryadarma dibawa ke Lapangan Terbang Meguwo untuk diterbangkan menuju ke Lapangan Terbang Cililitan Jakarta. Setelah transit di Jakarta, selanjutnya mereka diterbangkan ke Pangkal Pinang Pulau Bangka. Dengan didampingi oleh seorang kontrolir Belanda, mereka dibawa ke pesanggrahan di Gunung Menumbing milik perusahaan timah yang berjarak kurang lebih 150 km dari Pangkal Pinang.¹⁶

Belanda memang memperoleh hasil taktis atau keuntungan taktis, namun gagal mendapatkan hasil atau keuntungan strategis maupun politik. Berita-berita radio Belanda menggambarkan bahwa Belanda sedang mengalami “mabuk kemenangan” terutama setelah berhasil menawan para pemimpin republik, namun sesungguhnya perang rakyat

¹⁶ Mohammad Hatta, 2011, op.cit., hal. 200-202.